

PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
(Suatu Studi Di Desa Gamomeng Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011)¹

Oleh : Kristianos G Salasa²

ABSTRAK

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu sarana partisipasi politik sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat. karena pada saat pemilihan kepala rakyat menjadi pihak yang paling berperan penting dengan memberikan suaranya secara langsung Meningkatnya jumlah pemilih di Desa Gamomeng di sebabkan oleh beberapa faktor yakni status sosial dan ekonomi, situasi, afiliasi politik orang tua, pengalaman berorganisasi, kesadaran politik, kepercayaan terhadap pemerintah, perangsang partisipasi melalui sosialisasi media massa dan diskusi-diskusi informal serta peran tokoh agama.

Paigee (dalam Kamarudin, 2003:95) membagi partisipasi politik menjadi empat tipe. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif. Sebaliknya, apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatis). Tipe partisipasi ketiga berupa militan radikal, yakni apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Selanjutnya, apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif). Kedua faktor diatas bukan faktor-faktor yang berdiri sendiri (bukan variable yang independen). Artinya, tinggi rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor lain, seperti status sosial dan status ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud dengan status sosial ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Tulisan ini akan mencoba melihat factor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik di tingkat desa khususnya yang terjadi di desa Gamomeng Kabupaten Halmahera Barat.

Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Desa

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perkembangan demokrasi yang ada di negara Indonesia telah mengalami pasang surut. Dimana ditandai dengan adanya era reformasi yang telah membawa perubahan terhadap aspek-aspek kehidupan di Indonesia, baik dari segi sistem politik, ekonomi, hukum, budaya dan lainnya yang telah mengalami pergeseran struktur sejak reformasi bergulir. Perubahan sistem yang multi dimensional seperti ini telah menjadikan perubahan peta kekuatan politik baik di tingkat pusat

¹ Merupakan Skripsi penulis

² Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Jurusan Pemerintahan, FISIP UNSRAT Manado

maupun di daerah yang menuntut adanya suatu pembaharuan dalam sistem politik agar lebih terbuka dan demokratis dengan harapan terciptanya suatu kestabilan politik yang dinamis.

Demokrasi di negara kita telah berlangsung semenjak berdirinya Republik Indonesia dengan masalah pokok yang sangat beraneka ragam seperti budaya, tingkat kehidupan ekonomi dan juga membina kehidupan sosial dan politik. Dalam kehidupan politik hal tersebut di tandai dengan dilaksanakannya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, begitu pula pelaksanaan demokrasi di desa telah berlangsung sejak lama, apalagi di era reformasi yang ditandai dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah serta diamandemennya UU No. 22 Tahun 1999 dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Maka pemerintah yang baru mengeluarkan UU tentang pemerintah daerah yang baru yaitu UU No. 23 Tahun 2014 dan UU tentang pemilihan kepala desa yang baru yaitu UU No. 6 Tahun 2014.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus kepentingan sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan khususnya suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pembagian daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintah negara dan hak asal-usul yang bersifat istimewa seperti marga dan dusun. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menghormati kedudukan daerah-daerah yang bersifat istimewa tersebut dengan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan asal-usul daerah tersebut.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Begitu pula dalam penyelenggaraan Pemerintah desa harus sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintah desa tidak terlepas dari Kepala Desa. Pemerintah desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih masyarakat desa yang sudah mempunyai hak memilih dan dipilih. Syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan peraturan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014. Kepala Desa ditetapkan melalui perolehan suara terbanyak dalam pemilihan yang nantinya dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 hari setelah proses pemilihan.

Pemilihan kepala desa tidak terlepas dari adanya partisipasi politik masyarakat desa. Partisipasi politik pada hakekatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara dalam menginterpretasikan sejumlah simbol kekuasaan (kebijaksanaan dalam mensejahterakan masyarakat sekaligus langkah-langkahnya) ke dalam simbol-simbol pribadi. Atau dengan perkataan lain, partisipasi politik adalah proses memformulasikan ulang simbol-simbol komunikasi berdasarkan tingkat rujukan yang dimiliki baik secara pribadi maupun

secara kelompok (*individual reference, social references*) yang berwujud dalam aktivitas sikap dan perilaku (Soemarsono, 2002:4.5).

Partisipasi politik masyarakat desa akan berjalan dengan lancar apabila ada perilaku politik dari masyarakat desa dan sosialisasi politik serta komunikasi politik yang baik dari para bakal calon kepala desa mengenai visi dan misi atau program kerja yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan sosialisasi politik yang dilakukan oleh para bakal calon kepala desa biasanya dilakukan jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan pemilihan berlangsung dengan cara yang sangat menegangkan, panas, penuh dengan teknik, terror dan syarat dengan modal (politik uang). Umumnya, para calon kepala desa memiliki jaringan kekeluargaan yang sangat kuat, solid dan kompak serta memiliki modal uang paling memiliki potensi yang besar untuk memenangkan sebagai kepala desa. Para bakal calon biasanya orang yang kuat secara politik dan ekonomi didesanya.

Begitu pula partisipasi politik pada masyarakat di Desa Gamomeng Kecamatan Sahu Timur sangat ditunjang oleh kegiatan-kegiatan masyarakat Desa Gamomeng dengan cara adanya aktivitas-aktivitas dalam pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tersebut. Maksud adanya aktivitas dalam Pilkades di sini yaitu adanya *money politic* dari kelompok kepentingan seperti petaruh atau penjudi pada saat pemilihan berlangsung yang bertujuan dapat mempengaruhi masyarakat Desa Gamomeng pada saat pemberian suara berlangsung dengan cara memberikan imbalan atas partisipasinya memilih calon Kepala Desa (Kades) sesuai dengan keinginan petaruh.

Selain aktivitas-aktivitas dalam Pilkades dari masyarakat Desa Gamomeng dapat juga menjadi partisipan dalam Pilkades dengan cara: ikut menjadi juru kampanye (Jurkam) dalam mensosialisasikan program-program yang akan dicapai dari salah satu calon kades, ikut menjadi anggota aktif dari kelompok kepentingan seperti halnya dalam aktivitas dari masyarakat yaitu menjadi tim sukses atau mendukung salah satu calon kades, aktif dalam proyek-proyek sosial atau program-program sosial desa seperti mempromosikan program-program yang akan dicapai dari salah satu calon kades tersebut, misalnya calon kades tersebut ingin membangun sarana air bersih, saluran air untuk mencegah banjir bagi masyarakat Desa Gamomeng yang belum mendapatkan sarana-sarana tersebut.

Masyarakat Desa Gamomeng yang ikut dalam aktivitas dalam Pilkades, menjadi partisipan dalam Pilkades ada juga yang menjadi pengamat mengenai jalannya Pilkades baik dari tahap pencalonan sampai pada tahap pelaksanaan, seperti menghadiri rapat-rapat umum atau diskusi-diskusi mengenai siapa saja yang akan mencalonkan menjadi kades, mengamati siapa-siapa saja yang menjadi tim sukses dari masing-masing calon kades, mengikuti perkembangan politik dari masing-masing calon kades, pengamat tersebut juga memberikan suaranya dalam Pilkades setelah melihat dan mengamati secara langsung dari masing-masing calon kades.

Umumnya dalam pemilihan Kepala Desa Gamomeng minat masyarakat begitu tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam proses Pilkades tersebut, karena bagi sebagian masyarakat tidak ada lagi tekanan dan intimidasi politik dari pihak manapun dan sebagian masyarakat adanya paksaan dari salah satu kandidat calon Kepala Desa (Kades) melalui tim suksesnya dengan membagikan kaos dan stiker serta adanya tekanan-tekanan para penjudi atau petaruh yang hadir dalam pelaksanaan pemilihan berlangsung. Dimana para petaruh tersebut memberikan uang secara cuma-cuma kepada sebagian masyarakat agar memilih calon yang di suruh oleh petaruh tersebut, banyak sekali masyarakat yang mengikuti keinginan para petaruh tersebut untuk memilih salah satu calon karena telah diberikan imbalan sebelum masuk kedalam bilik suara. Selain itu ada juga sebagian masyarakat lainnya memilih calon kepala desa tersebut karena memiliki hubungan kekeluargaan (*trah*) dengan salah satu calon tersebut.

Selain ikut dalam aktivitas pada pelaksanaan Pilkades, menjadi partisipan dalam pelaksanaan Pilkades dan menjadi pengamat dalam pelaksanaan Pilkades, ada juga masyarakat menjadi orang yang apathis terhadap pelaksanaan Pilkades. Orang apathis tersebut benar-benar tidak peduli tentang pelaksanaan Pilkades baik dari tahap pencalonan sampai pada tahap pelaksanaan Pilkades, orang apolitis juga bisa tidak memilih salah satu calon kades dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Gamomeng.

Pemilihan Kepala Desa Gamomeng telah berlangsung pada tahun 2011 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana masyarakat Desa Gamomeng Kecamatan Sahu Timur memiliki antusias yang tinggi dalam berpartisipasi yaitu dengan memberikan suaranya pada Pilkades, karena mereka memiliki harapan yang tinggi di pundak calon yang mereka pilih untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya dengan menciptakan rasa aman, nyaman, tentram serta membuka lapangan kerja baru, adanya kartu kesehatan bagi masyarakat miskin, memberantas kemiskinan, dan lain sebagainya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat penulis angkat adalah sebagai berikut: Apa penyebab terjadi tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Gamomeng Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat?

Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Gamomeng Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat.

Manfaat penelitian :

1. Manfaat Teoritis

Berbagai pemikiran, konsep, dan gagasan teoritis yang dikemukakan serta diperoleh dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu sosial dan politik pada umumnya, dan bagi pengembangan ilmu politik pada khususnya, terutama menyangkut partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak berkepentingan baik aparat pemerintah desa maupun masyarakat khususnya di desa gamomeng kecamatan sahu timur kabupaten Halmahera barat.

KERANGKA TEORI

Berdasarkan tinggi rendahnya, Paigee (dalam Kamarudin, 2003:95) membagi partisipasi politik menjadi empat tipe. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif. Sebaliknya, apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatis). Tipe partisipasi ketiga berupa militan radikal, yakni apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Selanjutnya, apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif). Faktor-faktor diatas bukan faktor- faktor yang berdiri sendiri (bukan variable yang independen). Artinya, tinggi rendah faktor-faktor itu dipengaruhi

oleh faktor lain, seperti status sosial dan status ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena data yang penulis kumpulkan adalah data bentuk kata-kata, kalimat, maupun pencatatan dokumen artinya permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistic melainkan masih dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka relevansi atau frekuensi. (Arikunto, Suharsimi, 2002:35)

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang di ambil penulis adalah data kualitatif, sehingga teknik pengumpulan data menggunakan:

1. Wawancara

Moleong (2002:52) mengatakan bahwa metode wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan antara peneliti (atau orang di tugasi) dengan subyek penelitan atau informan dan sumber data. Dalam hal ini pewawancara menggunakan percakapan sedemikian sehingga yang di wawancara bersedia terbuka mengeluarkan pendapatnya. Dalam penelitian ini orang yang diwawancarai adalah tokoh masyarakat, PNS, tokoh pemuda, tokoh adat dan mahasiswa.

2. Observasi

Poerwandari (2007:35) observasi barangkali menjadi metode yang paling dasar dan paling tua dari ilmu-ilmu social, karena dalam cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Opservasi adalah suatu aktivitas dalam mengenal tingkalaku individu dan biasanya di akhiri dengan mencatat hal-hal yang penting dan merupakan studi yang dilakukan dengan sengaja dan secara systematis melalui proses pengamatan atau gejala-gejala spontan yang terjadi pada saat itu Poerwandari (2007:36). Banister dkk (dalam Poerwandari 2007:37) mengatakan bahwa observasi selalu menjadi bagian dalam penelitian psikologis, dapat berlangsung dalam konteks laboratorium (eksperimen) maupun dalam konteks alamia. Sedangkan menurut patton (dalam poerwandari, 2007:38) observasi merupakan metode pengumpulan data esensial dalam penelitian, apalagi penelitian dengan pendekatan kulitatif.

3. Studi dokumen

Studi dokumen adalah cara pengumpulan data dengan mempelajari arsip atau dokumen-dokumen, yaitu seriap bahan tertulis baik internal maupun eksternal yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian (moleong 2002:163).

Metode Analisis Data

Pada penelitian ini menganalisis data yang terkumpul dengan menggunakan model analisis interaktif, yaitu:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Pada awal pengumpulan data penelitian sudah harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ia jumpai dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

2. Reduksi data,

yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan - catatan tertulis di lapangan (Miles dan Huberman, 1992:16). Reduksi data ini akan secara terus menerus secara penelitian berlangsung.

3. Sajian data,

yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan (Miles dan Huberman, 1992:17)

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Kegiatan penarikan kesimpulan mencakup pencarian arti atau makna data serta memberi penjelasan. Makna dan arti yang diperoleh tersebut harus diuji kebenaran serta kecocokkannya melalui kegiatan verifikasi. Verifikasi tersebut merupakan validasi data yang disimpulkan (Miles dan Huberman, 1992).

PEMBAHASAN

Berdasarkan tinggi rendahnya kedua faktor tersebut, Paige (dalam Kamarudin, 2003:95) membagi partisipasi politik menjadi empat tipe. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif. Sebaliknya, apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatis). Tipe partisipasi ketiga berupa militan radikal, yakni apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Selanjutnya, apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif). Kedua faktor diatas bukan faktor- faktor yang berdiri sendiri (bukan variable yang independen). Artinya, tinggi rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor lain, seperti status sosial dan status ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud dengan status sosial ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan.

A. Tahapan Pemilihan Kepala Desa Gamomeng Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011

1. Proses pembentukan panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Gamomeng dilakukan 4 bulan sebelum masa jabatan kepala desa berakhir dan itu dilakukan oleh BPD yang akan membentuk panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa yang terdiri dari Ketua, sekretaris dan bendahara kemudian di tambah dengan anggota-anggota yang terdiri dari para ketua RT dan para tokoh masyarakat desa.
2. Setelah terpilih panitia pemilihan maka mereka wajib melaporkan kepada ketua BPD tentang perancangan dan mengusulkan biaya pemilihan kepada BPD dan mereka mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan di adakan pemilihan kepala desa. Secara organisasi panitia pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk organisasi karena terdiri dari kumpulan beberapa orang yang melakukan kerjasama untuk melaksanakan pemilihan kepala desa. Menurut Stephen P. Robbins mendefinisikan organisasi sebagai sesuatu kesatuan (entity) social yang di koordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas sadar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan.
3. Proses pendaftaran bakal calon kepala desa pada saat pendaftaran bakal calon kepala desa di desa Gamomeng jumlah yang di tentukan tidak di batasi oleh panitia tetapi pada saat pembukan pendaftaran sampai penutupan pendaftaran jumlah bakal calon kepala desa

yang mendaftar hanya dua calon kepala desa yang mendaftar untuk menjadi kepala desa di desa gamomeng yaitu Junus Batkorbawa dan Jonathan Hodja.

B. Pelaksanaan Demokrasi pada proses Pemilihan Kepala Desa di Desa Gamomeng Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011

Salah satu wujud pelaksanaan demokrasi di desa adalah partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik. Seperti berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Untuk mengetahui deskripsi hasil pemilihan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Gamomeng adalah sebagai berikut :jumlah pemilih adalah 405 orang, yang ikut memilih 390 orang, dan yang tidak ikut memilih (golput) adalah 15 orang yang terdiri dari 6 orang 1 perempuan dan 9 laki-laki.

Calon kepala desa dalam pemilihan Kepala Desa Gamomeng tahun 2011

Di Desa Gamomeng berjumlah 2 (dua) orang, dengan masing-masing perolehan suara sebagai berikut :

No	Nama Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	Junus Batkorbawa	186
2	Yonathan Hodja	204

Sumber data : kantor Desa Gamomeng 2011

Salah satu wujud pelaksanaan demokrasi di desa adalah partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik seperti berpartisipasi dalam pelaksanaan kepala desa.

Dalam proses pemilihan kepala desa di Desa Gamomeng tahun 2011, dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan di temukan bahwa pada pemilihan kepala desa di Desa Gamomeng pada tahun 2011 terjadi kecurangan yang dilakukan oleh salah satu kandidat dengan cara memanipulasi data atau melakukan pengelembungan data.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah seorang informan diperoleh data bahwa jumlah DPT yang di gunakan pada saat pemilihan pada Tahun 2011 itu sedikit tidak masuk akal karena tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang ada. Hal itu disebabkan karena pendataan yang dilakukan kurang sesuai. Menurutnya pendataan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan pelaporan bulanan desa tentang data penduduk jarang dilakukan sehingga data yang digunakan seringkali tidak sesuai karena data untuk masyarakat yang tidak berada di desa dan yang sudah meninggal masih terdaftar dalam DPT pada pemilihan.

Hal senada diungkapkan oleh D.M salah seorang ketua pemuda di desa Gamomeng. menurutnya pemilihan kepala desa pada tahun 2011 yang di lakukan pada saat itu tidak sesuai dengan apa yang di prediksi olehnya karena pada pemilihan pada saat itu tidak sesuai dengan prosedur yang di terapkan oleh panitia pelaksanaan karena banyak kecurangan yang terjadi. Salah satu informan yaitu A.N yang adalah sekertaris desa, juga mengaku data yang digunakan oleh panitia pada saat pemilihan kepala desa tahun 2011 saat itu memang sedikit terjadi ketidaksesuaian dengan data yang sebenarnya.

Namun terlepas dari itu semua dari hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Gamomeng cukup baik. Hal ini di lihat dari indikator pengukur dalam implementasi demokrasi dalam pemilihan kepala desa terlihat rata-rata cukup baik. Hal itu terlihat hingga kini kondisi social masyarakat di Desa Gamomeng Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera barat pasca pemilihan kepala desa sampai saat ini dalam keadaan cukup baik dan kondusif.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada pemilihan kepala desa di Desa Gamomeng menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat di desa sangatlah tinggi. Tetapi tingkat partisipasi politik yang sangat tinggi itu di sebabkan oleh salah satu kandidat dan timnya yang melakukan manipulasi data pemilih tetap (DPT) pada pemilihan kepala desa di Desa Gamomeng.

B. Saran

Panitia pelaksanaan yang ditunjuk sebaiknya menjalankan fungsinya dengan baik dan tidak boleh berpihak. Kepada masyarakat Desa Gamomeng Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat hendaknya dalam memberikan aspirasi politik selalu berdasarkan pada aturan-aturan dan etika dalam menyalurkan aspirasi dalam menyalurkan aspirasi politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbi Sanit. 1985. *Swadaya Politik Masyarakat*. Penerbit. CV. Rajawali, Jakarta
- Arifin Rahman. 2002. *Sistem Politik Indonesia*. Surabaya, SIC
- Adhan Dambea. 2010. *Komunikasi Politik*. Diterbitkan Yayasan AL-ADHA dan Yayasan SERAT Manado
- Bouman BAM. 2006. *A system's approach to the analysis of crop waterproductivity*. Agric. Syst. 87:249-273.
- Choppy Haricahyono, 1986. Ilmu Politik dan Perspektifnya, Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Huntington Samuel P. & Nelson John, Partisipasi Politik di Negara berkembang, PT Rineka Cipta, 1994
- Huntington, S.P & Nelson, J.M. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Kamaruddin. 2003. *Partai Politik Islam di Pentas Reformasi; Refleksi Pemilu 1999 untuk Pemilu*. Jakarta: Visi Publishing
- Hafied Cangara. 2011. *Komunikasi Politik Konsep, Teori, Dan Strategi*. Edisi Revisi. Raja Grafindo Persada. Bandung
- Miriam Budiardjo. 1991. *Dasar-dasar politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Moleong Lexi J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ed revisi. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy. 2002. Metode penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Poerwandari, E. Kristi. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Universitas Terbuka
- Poerwadarminata 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka Utama. Jakarta
- Prof, Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* , Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008
- Prof. Dr .Sugiono , *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (MIXED METHODS)*, Penerbit Alfabeta, Bandung 2013
- Ruslan, Utsman Abdul Mu'iz. 2000. *Tarbiyah Siyasiyah: Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Jakarta

Rafael Raga Maran, 2007, Pengantar Sosiologi Politik. Diterbitkan oleh. PT RINEKA CIPTA, Jakarta.

Sastroatmodjo, Sudijono 1995, *Perilaku Politik*, IKIP Semarang Press: Semarang

Soewarno Handoyo Ningrat, 1980. *Pengantar Ilmu Studi Administrasi dan Manajemen*, CV. Haji Masagung Jakarta

Soekanto, Soerjono. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syafiie, Kencana Inu, 2009. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: PT Refika aditama

Surtato, 2006, *Dasar-dasar kepemimpinan administrasi*. Yogyakarta. Gadjah Mada University

Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo

Syarbaini, 2002, *Sosiologi dan Politik*. Jakarta. Ghalia Indonesia

Sumber-Sumber Lain :

Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

<https://abunvanzablog.wordpress.com/artikel-makalah-2/panitia-pemilihan-kepala-desa-yang-efektifstrategi-pelaksanaan>

<http://05sagitarus.wordpress.com/2009/06/01/partisipasi-politik/>

<http://alkhazim26.wordpress.com/2010/02/10/struktur-politik/>

<https://mrobby.wordpress.com/tag/dan-nimmo/>

<http://www.scribd.com/mobile/doc/253648905/permendagri-no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa-pdf>